

Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora
Univesitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Persepsi Masyarakat terhadap Komunikasi Kebijakan Publik dan Partisipasi Politik di Media Sosial

DOI: <https://doi.org/10.32509/petanda.v8i1.6332>

Bunga Amelia*, Rahmat Hidayat

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Jalan RTA Milono Km 1,5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
*Email Korespondensi: bungaamelia.ab@gmail.com

Abstract - This study examines the explanatory limits of reception theory within the context of digital public policy dissemination dominated by one-way government communication. Aiming to analyze public reception of this communication model and its impact on digital political participation, this descriptive qualitative research integrates Audience Reception Theory and political participation theory. Data were gathered through in-depth interviews with 15 informants and public comment analysis on social media. The novelty of this research lies in the discovery of a fourth position beyond Hall's classic typology: the filtered position, experienced by marginalized groups with specific access barriers, such as people with disabilities. The findings reveal that reception dynamics produce a non-linear spectrum of participation, ranging from passive engagement and non-conventional activism to the emergence of 'digital political apathy'—a withdrawal mechanism triggered by unresponsive public square communication. Scientifically, this study contributes to re-theorizing Stuart Hall's reception model in the digital era by incorporating access inclusivity as a critical variable. Implikasinya, this research extends political communication literature by demonstrating that the failure of dialogic governance does not merely breed opposition, but drives a structural reconstruction that systematically marginalizes vulnerable groups from digital deliberative spaces.

Keywords: Political Apathy; One-Way Communication; Public Policy; Social Media; Public Participation

Abstrak - Penelitian ini menguji batas eksplanatori teori resepsi dalam konteks diseminasi kebijakan publik digital yang didominasi komunikasi satu arah pemerintah. Bertujuan menganalisis resepsi masyarakat terhadap model komunikasi tersebut dan dampaknya pada partisipasi politik digital, penelitian kualitatif deskriptif ini mengintegrasikan Audience Reception Theory dan teori partisipasi politik. Data dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan serta analisis komentar publik di media sosial. Novelty penelitian ini terletak pada penemuan posisi keempat di luar tipologi klasik Hall, yaitu posisi tersaring (filtered position), yang dialami oleh kelompok dengan hambatan akses spesifik seperti penyandang disabilitas. Temuan menunjukkan bahwa dinamika resepsi ini menghasilkan spektrum partisipasi yang tidak linear, mulai dari keterlibatan pasif, aktivisme non-konvensional, hingga munculnya fenomena 'apatisme politik digital' sebagai bentuk penarikan diri akibat komunikasi ruang publik yang tidak responsif. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada teoretisasi ulang model resepsi Stuart Hall di era digital dengan memasukkan variabel inklusivitas akses. Implikasinya, studi ini memperluas literatur komunikasi politik dengan membuktikan bahwa kegagalan komunikasi dialogis pemerintah tidak sekadar memicu oposisi, melainkan rekonstruksi struktural yang meminggirkan kelompok rentan dari ruang deliberatif digital.

Kata Kunci: Apatisme Politik; Komunikasi Satu Arah; Kebijakan Publik; Media Sosial; Partisipasi Publik

Pendahuluan

Perkembangan media sosial telah mengubah dinamika komunikasi politik menjadi ruang interaksi yang lebih luas antara pemerintah dan warga negara. Di Indonesia, menurut survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) di tahun 2025, pengguna internet mencapai 80,66% termasuk di dalamnya pengguna media sosial. Hal ini memaksa pemerintah untuk menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan X (Twitter) sebagai medium untuk menjangkau masyarakat secara efektif. Secara teori, praktik ini sejalan dengan definisi komunikasi politik (McNair, 2003), sebagai proses interaksi antar pemerintah, warga negara, dan media dalam kerangka pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial menjadi lumrah sebagai sarana komunikasi politik di Indonesia. Namun, meskipun terkoneksi, belum serta-merta menjamin komunikasi politik mengenai kebijakan publik tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Realitas pemanfaatan media sosial oleh pemerintah Indonesia masih berorientasi pada top-down, di mana pendekatan ini hanya berfokus pada fungsi informatif dan persuasif. Pendekatan menciptakan paradoks digital, yaitu penggunaan platform interaktif untuk monolog, sehingga gagal menciptakan ruang timbal balik yang diskursif. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah cenderung hanya fokus pada fungsi informatif komunikasi politik, sementara fungsi lainnya seperti sosialisasi nilai politik, ekspresi kepentingan publik, dan kontrol kekuasaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keseimbangan keempat fungsi tersebut merupakan indikator utama keberhasilan komunikasi politik yang demokratis (Cangara, 2021). Akibatnya, meski diseminasi informasi didapatkan secara masif, skeptisisme masyarakat justru meningkat akibat lemahnya kepercayaan dan maraknya disinformasi ((LIPI, 2020). Selain itu, ruang kritis media semakin menyempit akibat kontrol politik (Nasution & Dianto, 2022), menciptakan efek soft censorship, di mana media (termasuk media sosial) cenderung menahan diri untuk memberitakan kegagalan atau kebijakan kontroversial pemerintah. Akibatnya, fungsi media sebagai pilar keempat demokrasi yang seharusnya menjalankan peran pengawasan publik (watchdog function) melemah, sehingga masyarakat hanya akan terekspos pada media arus utama yang dibatasi narasi oposisinya serta diperkuat oleh pembentukan echo chamber melalui komunikasi satu arah (Raza, 2025), yang lebih berfokus pada menjaga loyalitas daripada membangun dialog. Pada akhirnya, model komunikasi ini menyebabkan masyarakat berada dalam konsumsi pesan politik yang seragam, tanpa ruang untuk mempertanyakan dan berpikir kritis, sehingga kehilangan kapasitas untuk menilai kebijakan publik secara rasional dan substantif. Jika diseminasi kebijakan publik tidak mampu menciptakan pemahaman yang komprehensif atau bahkan menimbulkan mispersepsi, apatisme, dan protes, maka hal itu dapat mengimplikasikan melemahnya partisipasi publik dalam proses bernegara.

Praktik komunikasi satu arah pemerintah di media sosial dicirikan dengan aktivitas seperti siaran informasi, pembaharuan kebijakan, dan *press release* tanpa diikuti oleh mekanisme umpan balik yang memadai, yang merupakan adopsi dari Model Komunikasi Satu Arah Shannon & Weaver (1949). Dalam konteks media baru, ini menimbulkan keadaan di mana media sosial yang hakikatnya interaktif justru digunakan dengan pendekatan monolog. Akibatnya, sering terjadi kesenjangan antara pesan yang disampaikan pemerintah dengan persepsi dan interpretasi masyarakat di lapangan. Namun, penelitian sebelumnya tentang efektivitas media sosial pemerintah masih didominasi oleh pendekatan dari sisi pengirim pesan,

seperti analisis konten, strategi branding digital (Graham & Broersma, 2013), atau pengukuran keterlibatan audiens yang bersifat statis. Padahal, efektivitas komunikasi politik tidak hanya ditentukan oleh apa yang disampaikan, tetapi juga oleh bagaimana pesan tersebut diterima dan dimaknai oleh khalayak (Hall, 1980). Berdasarkan hal tersebut, celah penelitian (research gap) yang teridentifikasi adalah masih terbatasnya eksplorasi mendalam terhadap pengalaman subjektif masyarakat sebagai audiens akhir dari diseminasi kebijakan model satu arah. Selain itu, belum ditemukan secara eksplisit tujuan penelitian yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan tujuan: (1) memetakan posisi pembacaan masyarakat terhadap komunikasi kebijakan publik pemerintah di media sosial berdasarkan Audience Reception Theory (Hall, 1980); (2) menganalisis bagaimana posisi pembacaan tersebut berpengaruh pada bentuk-bentuk partisipasi politik sesuai dengan tipologi (Verba & Nie, 1972); dan (3) merumuskan konsep 'apatisme politik digital' sebagai suatu bentuk respons terhadap model komunikasi satu arah dalam konteks Indonesia.

Secara ideal, komunikasi politik digital harus memfasilitasi pertukaran timbal balik yang setara (Grunig & Hunt, 1984) dan proses dialogis yang memberdayakan (Hedebro, 1982). Namun, realitas pada era pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pola top-down yang mengalami "defisit kualitas kognitif," di mana Presiden sendiri mengakui bahwa aspek komunikasi efektif terabaikan akibat fokus pada kerja cepat (Kompas, 2025; 2025b). Akibatnya, terjadi pergeseran fungsi media sosial dari ruang diskursus menjadi instrumen legitimasi kekuasaan (Rofiah et al., 2020), yang menciptakan paradoks berupa jangkauan informasi luas namun menghasilkan partisipasi politik yang dangkal, hegemonik, serta meminggirkan kelompok rentan (Tufekci, 2017; Wibowo & Pratama, 2022). Studi terdahulu umumnya terjebak pada analisis bias yang berpusat pada "sisi pengirim" (sender-oriented) dan melihat audiens sebagai entitas homogen, sehingga terdapat research gap yang signifikan mengenai bagaimana pola resepsi masyarakat terhadap kegagalan komunikasi satu arah ini secara kausalitas memengaruhi perilaku partisipasi politik digital mereka.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini mengambil positioning akademik yang tegas dengan menggeser fokus analisis ke "sisi penerima" (receiver-oriented). Melalui integrasi Audience Reception Theory (Hall, 1980) dan teori partisipasi politik (Verba & Nie, 1972), penelitian ini menjembatani teori komunikasi klasik dengan sosiologi politik untuk menguji bagaimana model komunikasi dapat menjadi faktor penghambat atau pendorong partisipasi. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kebijakan satu arah pemerintah di media sosial memengaruhi kesadaran dan partisipasi politik mereka. Pertanyaan ini mendesak untuk dijawab demi memahami dampak sosio-politis yang lebih luas terhadap masa depan demokrasi digital di Indonesia, bukan sekadar melihat aspek teknis komunikasinya saja.

Tujuan penelitian ini dirumuskan secara argumentatif untuk menolak anggapan konvensional bahwa apatisme digital lahir dari ketidaktahuan (ignorance) masyarakat. Sebaliknya, penelitian ini berargumen bahwa apatisme politik dibentuk secara struktural oleh pengalaman komunikasi pemerintah yang buruk dan tidak inklusif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memetakan posisi pembacaan masyarakat (dominan, negosiasi, oposisional) berdasarkan teori Hall (1980), menganalisis dampaknya terhadap bentuk partisipasi sesuai tipologi Verba & Nie (1972), serta merumuskan konsep baru 'apatisme politik digital' sebagai respons aktif-resistif dalam konteks Indonesia. Kontribusi teoritisnya terletak pada teoretisasi ulang model resepsi Stuart Hall di era digital dengan menempatkan persepsi subjektif masyarakat sebagai penentu efektivitas kebijakan serta mendekonstruksi konsep apatisme dari fenomena psikologis menjadi produk kegagalan struktural negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada persepsi masyarakat terhadap komunikasi politik satu arah yang dilakukan pemerintah melalui media sosial. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami makna subjektif dan penafsiran individu terhadap pesan politik yang beredar di ruang digital. Menurut (Moleong, 2017), penelitian kualitatif bertujuan menggali realitas sosial sebagaimana dipersepsikan oleh subjek penelitian secara mendalam dan kontekstual. Tahapan pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk menjamin keterarahan proses penelitian.

Penentuan Informan dan Durasi Penelitian. Penelitian ini mengambil lokus di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah urban-berkembang yang memiliki penetrasi internet tinggi namun memiliki dinamika representasi kelompok rentan yang unik dalam merespons isu nasional. Penelitian lapangan dilaksanakan selama dua bulan, terhitung sejak Oktober hingga November 2025, yang bertepatan dengan fase krusial diseminasi kebijakan publik awal pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2019) dengan kriteria sebagai berikut: (1) berusia 17 tahun ke atas; (2) aktif mengakses media sosial (minimal 3 kali dalam seminggu); (3) memiliki pengalaman melihat atau menanggapi unggahan politik pemerintah; dan (4) bersedia menjadi informan serta menandatangani informed consent. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 15 orang, yang ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation), di mana informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak lagi memberikan pengertian baru. Tabel 1 menyajikan rincian informan.

Tabel 1. Rincian Informan

Kode Informan	Usia	Jenis Kelamin	Latar Belakang (Pendidikan/Pekerjaan)
A1	25	P	Karyawan
A2	24	P	Karyawan
A3	25	P	Karyawan
A4	21	L	Mahasiswa
E1	24	P	Bidan
F1	21	L	Karyawan
F2	19	L	Mahasiswa
K1	31	L	Pengusaha
L1	23	P	Mahasiswa
L2	21	P	Mahasiswa
N1	23	L	Mahasiswa
N2	22	P	Mahasiswa
N3	20	P	Karyawan
S1	23	P	Guru
T1	23	P	Kreator Konten

Keterangan: Kode informan sudah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan identitas.

Prosedur Penelitian.

Prosedur penelitian diuraikan secara sistematis dalam lima tahap berikut: (1) Penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan penentuan fokus dan rentang waktu kebijakan publik yang diunggah

(unggahan kebijakan publik oleh pemerintah di media sosial, seperti akun Presiden, Kementerian, atau portal berita pada periode kepemimpinan Prabowo-Gibran); (2) Pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (tatap muka dan daring) serta analisis 200 komentar teratas dari unggahan terkait kebijakan publik pada akun Instagram @dpr_ri dan @prabowo periode 10-16 November 2025; (3) Transkripsi data dari rekaman wawancara ke dalam bentuk teks verbatim; (4) Reduksi data dengan memilah hasil wawancara dan komentar publik berdasarkan tema persepsi yang muncul, dilanjutkan dengan analisis tematik menggunakan kategorisasi posisi pembacaan (Hall, 1980) yaitu: (a) dominan-hegemonik, (b) negosiasi, (c) oposisional, serta kategorisasi partisipasi politik (Verba & Nie, 1972) yaitu apatis, pengamat, aktivis parokial, dan aktivis komunal; dan (5)

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan data wawancara dengan analisis komentar publik) dan metode (wawancara dan studi literatur), serta member checking kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan makna yang dimaksud partisipan. Teknik validasi yang utama dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan member checking.

Kode dan tema yang dikembangkan bersifat analitis, dirancang untuk secara langsung menjawab pertanyaan penelitian dan celah tentang 'pengalaman subjektif masyarakat' sebagai audiens akhir. Kategorisasi Posisi Pembacaan (Hall, 1980) ditentukan dengan:

1. Dominan-Hegemonik: Dikodekan ketika informan menerima pesan secara utuh tanpa kritik.
2. Negosiasi: Dikodekan ketika informan menerima sebagian pesan tetapi menyisipkan kritik atau kondisi personal.
3. Oposisional: Dikodekan ketika informan menolak seluruh pesan dan menawarkan tafsir alternatif.

Kategorisasi Partisipasi Politik (Verba & Nie, 1972) didapatkan dengan pemetaan:

1. apatis: Tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk apapun.
2. Pengamat (Spectators): Hanya membaca/menyaksikan, atau membagikan ulang (repost) konten.
3. Aktivis Parokial: Hanya terlibat untuk isu yang berdampak langsung pada dirinya. 4. Aktivis Komunal: Terlibat untuk isu yang berdampak pada komunitas/masyarakat luas.

Dalam analisis, ditemukan kategori di luar tiga posisi Hall, yaitu Posisi Tersaring, dimana informan tidak dapat memaknai pesan karena kesenjangan akses. Kategori ini dibentuk secara induktif dari temuan lapangan, dengan justifikasi teoritis dari teori Kesenjangan Digital (Van Deursen & Van Dijk, 2019; Van Dijk, 2020) yang menegaskan bahwa akses material dan keterampilan adalah prasyarat dasar untuk partisipasi digital. Lebih lanjut, perspektif Ekologi Media (Scolari, 2012) membantu memahami bahwa lingkungan media yang tidak aksesibel secara aktif 'menyaring' dan mengasingkan pengguna tertentu. Khusus untuk kasus disabilitas, konsep ini sejalan dengan kritik bahwa ruang digital dapat menciptakan ketidaksetaraan jika tidak dirancang secara inklusif (Goggin & Newell, 2003). Dengan demikian, 'Posisi Tersaring' menegaskan bahwa akses adalah prasyarat yang harus terpenuhi sebelum proses pemaknaan dalam Audience Reception Theory (Hall, 1980) dapat dimulai.

Seluruh informan diberikan penjelasan dan diminta persetujuan sebelum wawancara dilakukan, dan identitas mereka dijaga melalui penggunaan pseudonim. Adapun kutipan yang diambil dari komentar publik yang terbuka pada platform media sosial menggunakan prinsip etika penelitian digital (Townsend & Wallace, 2016) dengan identitas yang disamarkan.

Dengan alur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana masyarakat memersepsikan gaya komunikasi politik satu arah

pemerintah, sekaligus menyoroti sejauh mana ruang digital berfungsi sebagai arena partisipasi atau justru reproduksi hegemoni politik.

Hasil Dan Pembahasan

Media sosial memiliki andil dalam pergeseran pola komunikasi, ditandai dengan fungsi media sosial yang dapat menjadikan pengguna sebagai komunikator sekaligus berkomunikasi dengan kedudukan pengguna secara setara. Di sisi lain, bagi pemerintah, pembaruan ini menciptakan ruang untuk berinteraksi, sarana pelayanan, sumber daya, dan pusat integrasi data. Namun, pemanfaatan yang dilakukan pemerintah masih berputar pada penyebaran pesan kebijakan publik tanpa mengoptimalkan potensi efektivitas model komunikasi dua arah. (Anshari, 2020) mengklasifikasikan pengaruh media sosial pemerintah terutama pada dua area: dinamika komunikasi politik dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Kerangka ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana model komunikasi satu arah yang pada akhirnya berdampak pada persepsi publik serta bagaimana pengalaman di media sosial membentuk opini publik tentang pemerintah. Penelitian sebelumnya terfokus pada analisis konten dari sisi pemerintah atau strategi branding digital (Graham & Broersma, 2013), maka dalam penelitian ini telah mengungkap kompleksitas posisi khalayak sebagai penerima akhir pesan kebijakan.

Pada tingkat masyarakat sebagai penerima akhir informasi kebijakan publik yang disebarkan melalui media sosial, muncul sebuah paradoks terhadap model komunikasi satu arah pemerintah, yang meskipun diterapkan melalui platform yang secara inheren interaktif, justru memicu beragam bentuk partisipasi politik non-konvensional di kalangan masyarakat yang bersikap oposisional. Sementara, model yang sama ternyata melahirkan apatis politik pada kelompok lainnya. Kontradiksi ini mengisyaratkan bahwa hubungan antara komunikasi negara dan partisipasi warga negara di era digital jauh lebih kompleks daripada narasi linear yang sering diasumsikan. Beranjak dari temuan paradoks ini, pembahasan akan menelusuri tiga posisi pembacaan khalayak (Hall, 1980) dan mengaitkannya secara kritis dengan teori partisipasi politik (Verba & Nie, 1972), untuk mengurai mekanisme di balik dinamika tersebut.

A. Posisi Pembacaan Audiens dan Bentuk Partisipasi Politik terhadap Kebijakan Publik di Media Sosial

Berdasarkan Audience Reception Theory yang dikemukakan oleh Stuart Hall, menyatakan bahwa andil khalayak dalam menerima serta memaknai pesan di media cenderung lebih aktif daripada pasif. Pemaknaan pesan tersebut di latarbelakangi sosial, budaya, serta pengalaman hidup mereka. Teori ini mengembangkan makna (decoding) yang dikategorikan menjadi posisi pembacaan yang berdasar pada tiga probabilitas interpretasi: 1) posisi dominan-hegemonik (sesuai dengan kehendak pembuat pesan), 2) posisi negosiasi (di mana terjadi proses umpan balik seperti komentar), dan 3) oposisional (bertentangan dengan kehendak pembuat pesan).

Melalui penerapan Audience Reception Theory oleh Hall terhadap data dari 15 informan, telah terpetakan sebaran posisi pembacaan khalayak sebagai berikut:

1. Posisi Dominan-Hegemonik: 3 informan (N2, E1, A4)
2. Posisi Negosiasi: 5 informan (T1, L1, N1, N3, F2)
3. Posisi Oposisional: 6 informan (F1, S1, A3, A2, L2, K1)
4. Posisi Tersaring: 1 informan (A1 - penyandang disabilitas)

Selain posisi pembacaan, temuan respons khalayak media sosial yang bervariasi terhadap unggahan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa perbedaan dalam memaknai pesan secara langsung membentuk pola partisipasi politik mereka. Untuk menganalisis

dinamika ini, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis Verba dan Nie (1972) yang mengidentifikasi empat tipe partisipan: (1) Apatis, (2) Pengamat, (3) Aktivistis Parokial, dan (4) Aktivistis Komunal. Lebih lanjut, kerangka ini diperluas dengan konsep partisipasi konvensional dan non-konvensional dari Verba dan Nie untuk memetakan partisipasi di ruang digital. Partisipasi konvensional mencakup keterlibatan melalui saluran formal yang disediakan oleh negara (seperti mengikuti akun resmi atau menyaksikan siaran langsung rapat). Sementara partisipasi non-konvensional muncul sebagai bentuk keterlibatan alternatif di luar kanal resmi (seperti petisi online, fact-checking mandiri, dan unjuk rasa virtual) yang justru sering dipicu oleh ketidakpuasan terhadap model komunikasi satu arah pemerintah.

Berdasarkan analisis data menggunakan kerangka tersebut, ditemukan sebagian informan menunjukkan penerimaan terhadap narasi resmi pemerintah tanpa disertai sikap kritis. Temuan mengungkap empat posisi pembacaan yang berbeda, dimana posisi dominan-hegemonik (diwakili oleh N2, E1, A4) menampilkan karakteristik yang paling pasif. Kelompok ini menerima pesan kebijakan pemerintah secara utuh, mempersepsikan unggahan pemerintah semata sebagai komunikasi informatif yang telah menyediakan ruang dialog melalui kolom komentar. Namun, keyakinan terhadap ketersediaan ruang dialog ini tidak teraktualisasi dalam partisipasi aktif. Implikasinya terlihat pada kesadaran politik pasif dan partisipasi simbolis yang terbatas pada penerimaan informasi tanpa tindak lanjut yang nyata, dalam tipologi bentuk partisipasi politik oleh (Verba & Nie, 1972), ini sesuai dengan kategori pengamat (spectators) dimana keterlibatannya hanya dalam partisipasi yang bersifat pasif, bahkan mengarah pada bentuk apatis akibat penerimaan yang pasif.

Pada posisi negosiasi (diwakili oleh T1, L1, N1, N3, F2), informan menunjukkan respons yang kompleks dengan menerima sebagian pesan namun menyisipkan kritik terhadap aspek tertentu. Mereka mempersepsikan ruang dialog di media sosial sebagai ilusi karena komentar kritis cenderung diabaikan atau tenggelam oleh buzzer. Sebagai contoh, N1 mengakui manfaat kebijakan efisiensi anggaran di satu sisi, namun secara kritis menyoroti butterfly effect-nya dalam dunia pendidikan dengan menyatakan, "efisiensi anggaran menjadi senjata bagi kampus negeri untuk memotong anggaran dan transparansi semakin tertutup." Sementara itu, T1 merasa pemahamannya terhadap kebijakan terbatas karena, "tidak dibahas substansinya lebih mendalam." Pola resepsi ini menghasilkan partisipasi parsial yang terwujud dalam diskusi terbatas di ruang privat dan keterlibatan yang frustrasi, dimana keinginan untuk berpartisipasi secara substantif terhambat oleh saluran formal yang resmi karena dianggap tertutup. Temuan ini mengonfirmasi bahwa model komunikasi satu arah gagal memenuhi kebutuhan akan kejelasan dan akuntabilitas, sekaligus menggambarkan emosi atau pikiran informan yang saling berlawanan (positif dan negatif) yang hadir pada waktu yang sama, dimana informan yang tidak sepenuhnya apatis namun juga tidak dapat terlibat secara optimal. Keterlibatan yang kritis namun terhambat ini menempatkan mereka pada kategori 'Aktivistis Parokial' (Verba & Nie, 1972), dimana partisipasi politik mereka bersifat selektif dan seringkali dipicu oleh isu-isu yang berdampak langsung pada lingkup kehidupannya.

Posisi oposisional (diwakili oleh F1, S1, A3, A2, L2, K1) dicirikan oleh penolakan aktif terhadap narasi resmi pemerintah. Informan dalam kelompok ini memandang komunikasi pemerintah sebagai monolog yang sengaja mematikan ruang dialog, dengan L2 menyebutnya sebagai "siaran propaganda" dan S1 menilainya sebagai "penyesatan massa." Menariknya, penolakan ini justru memicu partisipasi politik non-konvensional dan aktivisme alternatif. Sebagai contoh, L2 menandatangani petisi online untuk menolak kebijakan yang kontroversial, sementara, A2, dan S1 aktif mengedukasi publik dengan membagikan ulang kritik dan opini ilmiah melalui kanal non-resmi. Meskipun menunjukkan sikap apatis terhadap partisipasi di ruang resmi pemerintah, mereka justru menampilkan keterlibatan yang tinggi di luar saluran

resmi pemerintah, melalui aktivitas seperti fact-checking mandiri dan pembagian utas kritik. Dengan demikian, posisi oposisional tidak dibatasi pada ketidakpedulian, namun juga pada transformasi partisipasi ke dalam bentuk-bentuk yang lebih vokal dan independen. Aktivisme di luar kanal resmi ini merepresentasikan pergeseran dari partisipasi konvensional ke non-konvensional. Dalam kerangka (Verba & Nie, 1972), meski mereka apatis terhadap saluran formal, tingkat keterlibatan dan orientasi kolektifnya sejatinya memperlihatkan semangat 'Aktivis Komunal', meski dalam wujud dan medium yang berbeda.

Temuan penelitian mengungkap dimensi pengucilan baru yang tidak tercakup dalam tiga posisi klasik Hall, yaitu Posisi Tersaring (The Filtered Position). Kategori ini muncul dari analisis terhadap pengalaman informan A1, seorang perempuan Tuli, yang menggambarkan bagaimana keterbatasan akses menghalangi proses penerimaan pesan sejak awal. Baginya, media sosial hanya dapat diakses melalui teks, visual, dan subtitle yang memadai. Pengalaman ini terganggu ketika informasi kebijakan publik hanya disajikan dalam format video tanpa teks atau subtitle. Keterbatasan ini bukanlah kegagalan personal, melainkan kegagalan sistemik dari model komunikasi yang tidak inklusif, yang berimplikasi langsung pada keterputusan dari kehidupan politik: “kurangnya aksesibilitas membuat saya tidak merasa terhubung.” Secara teoretis, posisi ini memperoleh justifikasi dari teori Kesenjangan Digital (Van Deursen & Van Dijk, 2019) yang menekankan akses material sebagai fondasi, dan Ekologi Media (Scolari, 2012) yang melihat lingkungan media yang tidak aksesibel secara aktif 'menyaring' partisipasi. Kritik terhadap reproduksi ketidaksetaraan di ruang digital (Goggin & Newell, 2003) semakin memperkuat posisi ini. Dengan demikian, Posisi Tersaring menegaskan tesis sentral bahwa akses adalah prasyarat fundamental yang harus terpenuhi sebelum proses pemaknaan dalam Audience Reception Theory (Hall, 1980) dapat dimulai, sekaligus mengkritik keterbatasan model komunikasi pemerintah yang mengabaikan inklusivitas.

Dari keempat posisi pembacaan yang teridentifikasi, posisi negosiasi, oposisional, dan tersaring menjadi kunci untuk memahami dinamika partisipasi politik dan apatisisme yang kompleks. Dalam posisi negosiasi, meskipun informan pada dasarnya menerima kerangka informasi mengenai kebijakan publik dari pemerintah, mereka tetap menyisipkan kritik atau kondisi personal. Sementara pada posisi oposisional, penolakan terhadap pesan justru memicu perlawanan aktif dan partisipasi non-konvensional. Namun, baik pada posisi negosiasi maupun oposisional, ketika ruang untuk negosiasi diabaikan dan perlawanan kritis tidak mendapat respons, maka dapat terbentuk apatisisme dalam keterlibatan di ruang resmi. Sementara itu, posisi tersaring menghadirkan bentuk apatisisme yang paling fundamental, dimana individu terkendala akses sebelum bahkan dapat memaknai pesan, sehingga keterlibatan terhambat sejak awal. Bahkan dalam pembacaan dominan-hegemonik yang tampaknya pasif, tersirat apatisisme berupa penerimaan tanpa keinginan untuk mengkritik. Dengan demikian, model komunikasi satu arah pemerintah tidak hanya menghasilkan respons yang berbeda-beda, tetapi secara sistematis berpotensi memicu berbagai bentuk apatisisme, mulai dari yang bersifat reaktif akibat frustrasi, hingga yang sistemik akibat eksklusivitas.

Tabel 2. Persepsi yang muncul terhadap informan.

Persepsi tentang sifat dan tujuan komunikasi yang sepihak	Persepsi terhadap ketiadaan mekanisme umpan balik	Persepsi tidak didengar dan ketiadaan kepercayaan	persepsi terhadap struktur kekuasaan yang timpang
N1: “unggahan dari pemerintah hanya menjadi sarana propaganda untuk menggiring opini publik	L2: “fitur ini hanya bersifat performatif. Jarang adanya bukti tindak lanjut nyata... komentar kritis di	N1: “tidak berinteraksi karena tidak merasa didengar.”	L1: “unggahan di media sosial hanya dijadikan acuan untuk melihat reaksi masyarakat...”

yang secara implisit mengarahkan masyarakat untuk mengapresiasi kinerja pemerintah dan mendukung kebijakan mereka.”	kolom akun resmi pemerintah dihapus massal atau dibalas oleh akun <i>buzzer</i> yang menyerang pribadi, bukan menanggapi substansi.”		perubahan cenderung dibuat untuk meredam aspirasi dan emosi rakyat... tetap bertahan dengan kebijakan awal.”
L2: “bukan lagi sekedar informasi, namun upaya mengendalikan opini publik agar sejalan dengan kehendak mereka.”	K1: “komentar-komentar masyarakat tidak akan dibaca... tidak mungkin akan ada respons resmi dari pemerintah.”	T1: “rasanya skeptis... sudah berusaha berdialog... akhirnya percuma karena suara saya tidak akan dipertimbangkan.”	A1: “kebijakan publik tidak dapat diganggu gugat... ruang digital cenderung menutup ruang komunikasi dua arah.”
S1: “maksud utama dari unggahan kebijakan publik tersebut terbatas pada propaganda rezim yang hanya menampilkan keberhasilan, serta merupakan penyesatan massa karena hanya menampilkan hal-hal yang positif.”	N3: “meskipun berkomentar, pemerintah sangat mungkin untuk tidak menanggapi.”	F1: “unggahan yang minim dialog, jadi mengurangi intensitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena percuma juga memberi pendapat kalau tidak digubris sama pemerintah.”	

B. Apatisme Politik Digital sebagai Konsekuensi Komunikasi Satu Arah

Berdasarkan analisis temuan penelitian ini, Apatisme Politik Digital dirumuskan sebagai sikap tidak mau terlibat dalam ranah politik pada ruang platform digital. Menghasilkan kondisi rasional masyarakat dalam ruang politik digital yang bukan disebabkan oleh ketidakpedulian, melainkan sebagai respons terhadap pengalaman berulang dalam sistem komunikasi politik yang tertutup dan represif. Konsep ini berlandaskan pada Audience Reception Theory (Hall, 1980) yang memposisikan apatisme digital sebagai bentuk “pembacaan oposisional yang terhambat” (blocked oppositional reading), di mana kesadaran kritis masyarakat tidak menemukan saluran ekspresi yang aman. Temuan ini konsisten dengan meta-analisis (Boulianne, 2020) yang menegaskan bahwa efek media digital sangat bergantung pada konteks politik, dan dalam keadaan Indonesia yang hierarkis, potensi partisipasi justru berubah menjadi pemisahan diri.

Berbeda dengan apatisme tradisional dalam teori partisipasi politik (Verba & Nie, 1972) yang berakar pada ketidaktahuan, apatisme digital justru lahir dari proses memaknai komunikasi kebijakan publik yang aktif, tetapi terhalang oleh struktur yang represif. Dukungan juga datang dari studi (Matthes, 2022) tentang dualitas media sosial yang menjelaskan mekanisme distraksi politis, dimana banjir informasi satu arah dari pemerintah berubah menjadi distraksi yang memicu pemisahan diri (disengagement). Contoh konkret terlihat pada pengalaman informan yang menyatakan keengganan berdiskusi politik di media sosial, dipicu oleh merosotnya kepercayaan dan, secara spesifik, rasa takut pasca pengesahan kitab undang-undang tertentu (KUHAP) yang dianggap oleh informan sebagai pembatasan hak free speech maupun ruang ekspresi. Bukti empiris dari pengalaman informan mengonfirmasi dinamika ini. Sebagaimana diungkapkan oleh A3, pola komunikasi top-down termanifestasi dalam sikap pejabat yang dipersepsikan menutup ruang dialog. Kutipan langsung Wakil Ketua DPR-RI

dalam forum Rapat Konsolidasi program MBG yang menyatakan "... ketika sudah rapat di DPR saya ketok (tidak dapat diganggu gugat)" menjadi contoh nyata yang mengonfirmasi persepsi informan mengenai model komunikasi yang kurang dialogis. Lebih jauh, A3 menyoroti kasus penolakan terhadap KUHAP yang dianggap tidak direspons secara memadai meskipun mendapat tentangan masif di media sosial melalui tagar #semuabisakena. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa umpan balik masyarakat dalam skala signifikan pun tidak cukup membuka ruang negosiasi dalam model komunikasi yang hierarkis.

Dengan demikian, kerangka teoritis yang dibangun memperjelas bahwa apatisme digital merupakan akumulasi kegagalan sistemik yang diperparah oleh desain komunikasi satu arah (Shannon & Weaver, 1949) dan lingkungan regulasi yang dipersepsikan membatasi. Sebagaimana diidentifikasi (Van Dijk, 2020) dalam teori kesenjangan digital, hambatan akses partisipasi menciptakan bentuk pengucilan baru di era digital. Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi proposisi sentral penelitian tentang dampak aktif model komunikasi tetapi juga menempatkan apatisme digital dalam diskursus akademis sebagai bentuk ketidakberdayaan struktural dalam demokrasi digital, di mana masyarakat yang sebenarnya memiliki kesadaran kritis memilih untuk menarik diri karena tidak menemukan saluran ekspresi yang memadai dan aman.

C. Keterpinggiran Kelompok Rentan dan Kesenjangan Akses

Terdapat kesenjangan akses (access gap) yang dialami oleh kelompok seperti komunitas tuli. Studi tentang aksesibilitas fisik bagi komunitas tuli di Indonesia mengungkap pola aksesibilitas yang diperlakukan sebagai akomodasi tambahan, bukan sebagai hak dasar yang terintegrasi dalam desain layanan publik (Handayani et al., 2024). Hambatan terbesar bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi pada sistem komunikasi yang tidak inklusif. Jika di bandara atau rumah sakit, ketiadaan juru bahasa isyarat menghambat akses ke layanan dasar, maka di media sosial pemerintah, ketiadaan subtitle menghalangi akses ke informasi politik. Adapun penyediaan teks untuk konten audiovisual merupakan disiplin komunikasi yang memiliki standar dan prinsip ketat untuk memastikan aksesibilitas dan pemahaman yang setara. Bentuk pengecualian ini bersumber dari logika kebijakan yang tidak menempatkan inklusi sebagai prinsip dasar terhadap akses. Temuan ini memperlihatkan bahwa model komunikasi satu arah pemerintah tidak efektif, dan secara fundamental bertentangan dengan prinsip demokrasi inklusif yang menekankan akses dan partisipasi setara bagi semua warga negara (Rista & Wiranata, 2024).

Berdasarkan kerangka (Lazar & Jaeger, 2011), keterbatasan akses yang dialami komunitas tuli, tidak hanya merupakan kegagalan teknis atau komunikatif, tetapi dapat dikonstruksikan sebagai pelanggaran hak hukum yang bersifat sistematis. United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, secara eksplisit menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik (Pasal 21 dan 29). Pasal 9 CRPD mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan akses terhadap informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas dijamin oleh seperangkat hukum internasional dan nasional yang mengikat, sehingga ketiadaan akses merupakan bentuk diskriminasi struktural yang melanggar prinsip kesetaraan partisipasi. Temuan terhadap pengalaman informan A1 menjadi bukti empiris dari kesenjangan antara janji hukum (*law in books*) dan praktik riil (*law in action*) dalam upaya Indonesia membangun demokrasi digital yang inklusif.

Dengan mengabaikan kebutuhan aksesibilitas bagi komunitas Tuli, pemerintah secara tidak langsung menyatakan bahwa partisipasi kelompok ini bukan prioritas dalam desain

demokrasi digital Indonesia. Apatisme digital yang dialami kelompok tersaring (seperti komunitas Tuli) harus dipahami sebagai gejala kegagalan demokrasi inklusif. Sebagaimana ditegaskan (Rista & Wiranata, 2024), demokrasi yang sehat mensyaratkan pemberdayaan melalui akses informasi. Pernyataan informan, “tidak terlalu mendorong saya untuk lebih aktif,” dengan demikian bukanlah sikap apolitis, tetapi merupakan respons rasional terhadap struktur yang menutup akses. Dengan demikian, demokrasi digital Indonesia tidak mampu dalam menyediakan partisipasi yang setara bagi seluruh warganya sejak dari tahap akses informasi. Ini memperkuat tesis bahwa apatisme politik digital yang dialami kelompok rentan adalah konsekuensi dari kegagalan negara yang berlapis dalam memenuhi kewajiban inklusifnya, baik di dunia fisik maupun digital. Apatisme terbentuk melalui pengalaman terus-menerus diabaikan dan secara struktural tidak diakomodasi oleh penyelenggara negara yang mampu menciptakan sistem.

D. Ruang Dialog Performatif dan Partisipasi Non-Konvensional di Media Sosial

Berdasarkan temuan penelitian, praktik pembatasan ruang dialog di media sosial resmi pemerintah (seperti pembatasan kolom komentar yang ditemukan pada unggahan @dpr_ri) dan ketiadaan respons terhadap komentar publik (seperti pada akun @prabowo) telah mengubah platform yang secara inheren interaktif menjadi ruang monolog yang terkontrol. Kondisi ini secara langsung memvalidasi persepsi informan bahwa ruang dialog hanyalah bersifat performatif, L2 mengungkapkan, “unggahan kebijakan publik pemerintah sama sekali tidak membuka ruang dialog... secara teknis terdapat fitur komentar, tapi sifatnya performatif saja.” Fenomena ini selaras dengan analisis (Castells, 2012) tentang communication power, di mana kekuasaan dalam era jaringan dimanifestasikan melalui kemampuan untuk mengontrol arus informasi dan membatasi ruang wacana publik.

Pada unggahan Instagram @dpr_ri pada 18 November 2025 berjudul ‘KUHAP Baru Disahkan Tidak Ada Pasal Penyadapan!’ Terlihat bahwa kolom komentar telah dibatasi, ini membenarkan pernyataan informan F1, “...kolom komentar ditutup...”

Pada unggahan akun resmi presiden (@prabowo), pemberian gelar pahlawan mendapatkan komentar kritis dari masyarakat, beberapa juga mengajukan pertanyaan namun tidak ada respons, hal ini memvalidasi perasaan informan K1: “...komentar masyarakat tidak akan dibaca...” dan informan N1: “...tidak didengar.”

Analisis data sekunder terhadap komentar publik pada unggahan terkait pengesahan KUHAP dan isu penokohan Soeharto menunjukkan bahwa respons warganet didominasi oleh sikap kritis dan resisten, terutama menyangkut kurangnya transparansi, absennya partisipasi publik, serta tidak jelasnya akses terhadap dokumen kebijakan. Pola ini terlihat dari komentar yang mempertanyakan prosedur legislasi, menolak legitimasi simbolik pemerintah, serta menyoroti komunikasi pemerintah yang dinilai satu arah dan tidak responsif. Komentar netral sebagian besar berupa permintaan klarifikasi informasi, menunjukkan adanya information gap yang menguatkan persepsi bahwa komunikasi kebijakan publik tidak disampaikan secara terbuka, sesuai dengan pengakuan informan T1: “meskipun dilengkapi dengan informasi, unggahan tersebut masih lebih banyak menonjolkan sisi positif tanpa membahas substansinya lebih mendalam.” Lebih lanjut, data sekunder menunjukkan bahwa komunikasi politik satu arah pemerintah bukan hanya menghasilkan kurangnya pemahaman publik, tetapi juga memicu reaksi resisten dan meningkatnya rasa apatis.

Ketika saluran komunikasi konvensional ditemukan membatasi, masyarakat menciptakan ruang partisipasinya sendiri. Temuan tentang partisipasi politik ke bentuk-bentuk aktivisme digital non-konvensional ini terlihat di ruang digital publik. Temuan tentang viralnya templat petisi penolakan KUHAP yang diunggah ulang oleh 232.000 akun Instagram, serta aktivitas fact-checking mandiri dan edukasi kebijakan melalui jaringan pribadi, merupakan bentuk adaptasi

taktis di luar kanal resmi. Hal ini memperkuat temuan dari informan L1, L2, S1, dan A2, "...lebih berani untuk mem-posting ulang ke story Instagram." Informan tersebut telah diketahui berpartisipasi dalam membagikan ulang unggahan yang mengkritisi kebijakan publik sebagai bentuk aktif dalam kegiatan politik. Pola ini menggambarkan mekanisme yang dijelaskan (Tufekci, 2017) dalam *Twitter and Tear Gas*, di mana aktivisme digital modern sering kali bermula dari kemampuan untuk membingkai ulang (reframe) narasi resmi, memobilisasi perhatian secara masif melalui jaringan digital, dan menciptakan tekanan politik melalui visibilitas viral, meski tanpa akses langsung ke pusat kekuasaan

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi kebijakan publik pemerintah di media sosial tetap mengadopsi model satu arah (Shannon & Weaver, 1949), menciptakan ruang dialog yang dipersepsikan informan sebagai bersifat performatif. Model ini secara aktif membentuk kesadaran dan partisipasi politik yang bersifat paradoks: di satu sisi memproduksi apatisisme politik digital pada kelompok dengan pembacaan dominan dan mereka yang terkendala akses. Di sisi lain, justru memicu aktivisme non-konvensional pada kelompok dengan pembacaan oposisional.

Implikasi Teoritis. Penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoritis utama. (1) Memperkaya Audience Reception Theory (Hall, 1980) dengan menerapkannya pada konteks pesan kebijakan formal pemerintah di era digital, sekaligus mengidentifikasi posisi tersaring (*filtered position*) sebagai kategori di luar tiga posisi klasik Hall yang disebabkan oleh kesenjangan akses. (2) Menjembatani secara konkret teori model komunikasi satu arah dengan tipologi partisipasi politik (Verba & Nie, 1972), dengan menunjukkan bagaimana model tersebut mendorong masyarakat ke dalam kategori partisipasi yang berbeda (Apatitis, Pengamat, Aktivis Parokial/Komunal). (3) Merumuskan konsep 'apatisisme politik digital' sebagai bentuk *disengagement* rasional yang berakar pada pengalaman komunikasi yang buruk dan terhambatnya ekspresi kritis, berbeda dari apatisisme tradisional yang berasal dari ketidaktahuan.

Implikasi Praktis. Berdasarkan temuan, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah: (a) Bertransisi ke model komunikasi dialogis dua arah yang mengintegrasikan mekanisme umpan balik yang transparan dan akuntabel; (b) Menerapkan standar aksesibilitas untuk memastikan inklusi kelompok disabilitas; (c) Memberi ruang untuk komunikasi publik digital yang partisipatif. Bagi masyarakat sipil dan public, direkomendasikan: (a) Memperkuat literasi media kritis untuk mendorong pemaknaan yang lebih sadar; (b) Membangun jejaring advokasi untuk mengkonsolidasikan suara kritis; (c) Mengoptimalkan kanal dan taktik partisipasi non-konvensional secara strategis.

Saran Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: (a) Sampel yang relatif kecil (15 informan) dan terbatas pada rentang usia muda serta lokasi urban tertentu (Palangka Raya), sehingga temuan belum tentu merepresentasikan keragaman demografis dan geografis Indonesia; (b) Fokus analisis yang belum membandingkan dinamika serupa di berbagai platform media sosial (e.g., TikTok vs. X); (c) Desain kualitatif yang mendalam namun tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik. Maka untuk penelitian mendatang, disarankan: (a) Studi multi-lokasi dengan sampel lebih besar dan beragam untuk menguji konsistensi temuan; (b) Pendekatan mixed-methods yang menggabungkan survei kuantitatif dengan wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif; (c) Studi komparatif yang menganalisis pola komunikasi dan respons masyarakat lintas periode pemerintahan atau rezim kebijakan yang berbeda.

Daftar Pustaka

(LIPI), L. I. P. I. (2020). *Kajian sosial dan humaniora dalam penanganan COVID-19: Aspek*

- komunikasi dan kepercayaan publik*. Pusat Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan - LIPI.
- Anshari, F. (2020). Komunikasi politik di era media sosial. *Jurnal Komunikasi Politik*, 8(2), 101–120.
- Boulianne, S. (2020). Social media and political participation: Updating the evidence. *Journal of Information Technology & Politics*, 17(1), 1–12.
- Cangara, H. (2021). *Komunikasi politik: Teori, strategi, dan aplikasi* (4 ed.). Rajawali Pers.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Polity Press.
- Goggin, G., & Newell, C. (2003). *Digital disability: The social construction of disability in new media*. Rowman & Littlefield.
- Graham, T., & Broersma, M. (2013). Twitter as a new(s) beat? A cross-national comparison of Twitter use and interactivity by news media. *Journalism Practice*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/17512786.2012.683340>
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. Holt, Rinehart and Winston.
- Hall, S. (1980). *Encoding/decoding BT - Culture, media, language: Working papers in cultural studies, 1972-79* (D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (eds.)); pp. 128–138). Hutchinson.
- Handayani, F., Tahir, M., & Setiawan, A. (2024). Aksesibilitas untuk Teman Tuli di Ruang Publik. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2398–2411.
- Hedebro, G. (1982). *Communication and social change in developing nations*. University Press.
- Kompas. (2025a). *Defisit kualitas kognitif dalam komunikasi politik pemerintahan Prabowo*. <https://www.kompas.id/>
- Kompas. (2025b). *Diakui Prabowo, mengapa komunikasi publik pemerintah buruk?* <https://www.kompas.id/>
- Lazar, J., & Jaeger, P. (2011). Reducing barriers to online access for people with disabilities. *Issues in Science and Technology*, 27(2), 68–82.
- Matthes, J. (2022). Social media and the political engagement of young adults: Between mobilization and distraction. *Online Media and Global Communication*, 1(1), 6–22. <https://doi.org/10.1515/omgc-2022-0006>
- McNair, B. (2003). *An introduction to political communication*. Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (revisi (ed.)). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, I., & Dianto, I. (2022). Demokrasi dan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. *Jurnal Demokrasi*, 9(1), 1–15.
- Raza, M. (2025). Media sosial sebagai ruang gema dan satu arah: Studi komunikasi politik pemerintah Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi Politik*, 11(1), 45–62.
- Rista, D., & Wiranata, I. H. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Warga Negara menuju Masyarakat yang Demokratis. *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 7, 1216–1227.
- Rofiah, R., Sumardjo, S., Sarwoprasodjo, S., & Lubis, D. P. (2020). Pola jaringan komunikasi pada partisipasi politik akar rumput: Studi netnografi media sosial Twitter pada Aksi Bela Islam. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(1), 33–48.
- Scolari, C. A. (2012). Media ecology: Exploring the metaphor to expand the theory. *Communication Theory*, 22(2), 204–225. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2012.01404.x>
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The mathematical theory of communication*. University

- of Illinois Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Townsend, L., & Wallace, C. (2016). *Social media research: A guide to ethics*. University of Aberdeen. https://www.gla.ac.uk/media/Media_487729_smxx.pdf
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- Van Deursen, A. J. A. M., & Van Dijk, J. A. G. M. (2019). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. *New Media & Society*, 21(2), 354–375. <https://doi.org/10.1177/1461444818797082>
- Van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide*. Polity Press.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. Harper & Row.
- Wibowo, T., & Pratama, R. (2022). Rekonstruksi citra Polri melalui komunikasi publik strategis. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan Dan Sosial*, 8(1), 75–91.